

PENERAPAN KAIDAH AL-ASHLU BARA'ATU DZIMMAH DALAM AKAD WAKALAH DAN KAFALAH

Anugrah Pratiwi
Institut Agama Islam Negeri Parepare
anugrahpratiwi2202@gmail.com

PENDAHULUAN

Prinsip "*Al Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakk*" (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) dan "*Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah*" (pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan) merupakan dua kaidah fundamental dalam hukum Islam yang memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak pasti atau ketika bukti-bukti yang ada tidak konklusif. "*Al Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakk*" menetapkan bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan, sehingga memberikan stabilitas dan kepastian dalam penerapan hukum. Sementara itu, "*Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah*" menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang tidak memiliki kewajiban atau tanggungan kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tuduhan atau tuntutan yang tidak berdasar. Kedua kaidah ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka hukum yang adil dan seimbang, di mana keyakinan yang sudah mapan dilindungi dari keraguan yang tidak beralasan, dan individu dilindungi dari kewajiban atau tuduhan yang tidak terbukti. Dalam praktiknya, penerapan kedua prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan muslim, mulai dari ibadah hingga muamalah, di mana keduanya bersinergi untuk menciptakan sistem hukum yang memberikan kepastian namun tetap fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks dalam kehidupan modern. Dengan demikian, hubungan antara kedua kaidah ini tidak hanya penting dalam konteks teoritis hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memberikan panduan yang jelas dalam pengambilan keputusan hukum dan etika dalam masyarakat muslim.

PEMBAHASAN

Kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah, yang menegaskan bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari tanggungan, memiliki penerapan yang signifikan dalam akad Wakalah dan Kafalah dalam hukum Islam. Dalam konteks Wakalah atau perwakilan, kaidah ini berfungsi sebagai perlindungan bagi wakil (penerima kuasa) dengan menetapkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan batasan yang diberikan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Hal ini memberikan rasa aman bagi wakil dalam menjalankan amanahnya, selama tidak terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Sementara itu, dalam akad Kafalah atau penjaminan, penerapan kaidah ini memiliki implikasi penting bagi kafil (penjamin). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungan kafil terbatas pada apa yang telah disepakati secara eksplisit dalam akad. Ini berarti bahwa kewajiban kafil tidak dapat diperluas melebihi apa yang telah disetujui, kecuali ada bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai besarnya tanggungan, pernyataan kafil yang akan dipegang sebagai acuan, selama tidak ada bukti yang membantahnya. Penerapan

kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah dalam kedua akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam. Ini memberikan kejelasan mengenai batas-batas tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, mendorong kejujuran dan itikad baik dalam bertransaksi, serta melindungi hak-hak individu dari tuntutan atau kewajiban yang tidak berdasar. Lebih jauh, kaidah ini juga memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan menyediakan panduan dasar untuk menentukan beban pembuktian dan tanggung jawab. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan kaidah ini bukanlah sesuatu yang kaku. Dalam praktiknya, para ahli hukum Islam mengakui bahwa mungkin ada situasi di mana pengecualian terhadap kaidah ini diperlukan demi mencapai keadilan yang lebih besar atau melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, penerapan kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah dalam akad Wakalah dan Kafalah harus selalu mempertimbangkan konteks, masalah, dan prinsip-prinsip keadilan Islam secara keseluruhan.

REFERENSI

- Amiruddin, M. M., Alshahrani, S. H., Dwijendra, N. K., Al-Hawary, S. I. S., Jalil, A. T., Muda, I., ... & Sunarsi, D. (2023). Religious behaviours and commitment among Muslim healthcare workers in Malaysia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(1).
- Amiruddin, M. M., Amir, N., & Sari, R. M. (2020). Umrah Service Management PT. Zakiah Dina Tayyibah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 65-74.
- Amiruddin, M. M., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2020). Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 15-28.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Qaed, I., Syaputra, E., Hilal, F. N., Febriansyah, M., Amiruddin, M. M., & Aziz, M. R. A. (2014). Maslahah as an Islamic source and its application in financial transactions. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(5), 66-71.
- BEDONG, M. A. R., & SYATAR, A. INNOVATION OF LAW ON CONTRACT IN SHARIA PAWNSHOPS.
- ARSYAD, M. A., & SISWANTO, D. J. THE INFLUENCE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE CITY.
- Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). CORE SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION: THE ROLE OF ISLAMIC MARKETING ETHIC IN SHARIA BANKING. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.
- Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafa'at). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 311-328.

- Hannani. (2023). Revisiting Islamic Law in Indonesia's Legal System Discourse: A Critical Analysis of the Legal and Social Implications. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(3), 13-17. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.3.3>
- Firman, H., & Haramain, M. (2022). Developing the Indonesian student's personality through recognizing local culture and literature: A brief study of Bugis pappaseng. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 6509-6519.
- Abbas, A., & Hannani, H. (2021). An Analysis of Accounting Practices for Zakat, Infaq, and Sadaqah in Lembaga Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Parepare, Indonesia: Standardization and Proposed Solutions. *Islamic Banking and Finance Review*, 8(2), 36-54.
- St Aminah, A. T., Jufri, M., Hannani, F., & Aswad, M. (2021). Cultural Assimilation in Community's Ritual TauLotang in Indonesia. *Rigeo*, 11(5).
- Nasuka, M., Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). CORE SERVICE AND CUSTOMER SATISFACTION: THE ROLE OF ISLAMIC MARKETING ETHIC IN SHARIA BANKING. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(2), 247-266.
- Zubair, M. K. (2023). EXPLORING THE MAQASHID AL SHARIAH DIMENSION TO EVALUATE THE MANAGEMENT OF BAYTUL MAAL. *Russian Law Journal*, 11(3), 897-906.
- BEDONG, M. A. R., & ZUBAIR, M. K. (2022). The Assesesment of Maqashid Sharia on Islamic Bank-An Evidence from Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 508-515.
- Semaun, S. (2022). THE EFFECT OF THE CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCING DECISION ON FINANCIAL PERFORMANCE AND FIRM VALUE OF THE BANKING INDUSTRY LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE. *Academy of Strategic Management Journal*, 21, 1-10.
- Fikri, F., Muchsin, A., & Semaun, S. (2019). Development of creative industries training towards sharia economic empowerment in Bilalangnge community, Parepare City, South Sulawesi. *Malaysian E Commerce Journal (MECJ)*, 3(2), 33-35.
- Tijjang, B. (2022). The Effectiveness of Marketing Initiatives toward the Growth of Rural Tourism in Indonesia. *Res Militaris*, 12(2), 7254-7271.
- Tijjang, B. (2022). Coffee Product Survival Strategy Amid Global Economic and Political Uncertainty. *International Journal of Global Community*, 5(2-July), 165-178.
- Tijjang, B. (2022). An Empirical Study on the Public Views of Tourist Travel Risk and Crisis Management: A Case of South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(05), 60-71.

- Astuti, A. R. T. (2023). Good Housing Governance Management in Indonesia. *International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEER)*, 3(2), 101-109.
- Hanafi, S., Shariati, A., Astuti, A. R. T., & Pratiwi, A. (2023). Reconstruction of The Authority of The Internal Oversight Unit In The Prevention of Corruption Crimes At State Religious Universities. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 544-557.
- Frihatni, A. A., Amiruddin, A., Darmawati, D., & Abbas, A. (2021). Earnings Response Coefficient, Sharia Online Trading System, and Firm Value: An Inference from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(4), 88-98.